

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah gizi pada balita, khususnya stunting, wasting, dan overweight, merupakan salah satu isu utama dalam tatanan kesehatan masyarakat yang masih terus menjadi tantangan besar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Di Indonesia, masalah stunting menjadi sangat krusial karena tidak hanya berhubungan dengan kualitas hidup anak-anak, tetapi juga masa depan bangsa. Menurut data dari World Health Organization (WHO) pada tahun 2020, stunting adalah salah satu kondisi yang paling banyak terjadi di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis yang berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif mereka. Dampak dari stunting, terutama di usia balita, sangat mempengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial.

Di Indonesia, pemerintah telah menyadari betul pentingnya masalah ini, sehingga kebijakan-kebijakan nasional tentang stunting terus diperkuat. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 yang dikeluarkan untuk mempercepat penurunan angka stunting di seluruh Indonesia. Perpres ini mendasari berbagai upaya yang dilakukan melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting, yang telah dimulai sejak tahun 2018. Dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting secara signifikan, pemerintah mengimplementasikan beberapa program yang

terintegrasi, seperti Program Gizi Nasional, Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Kesehatan Ibu dan Anak, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih di masyarakat. Semua ini adalah bagian dari upaya komprehensif yang mencakup sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Program Gizi Nasional, yang difokuskan pada peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita, bertujuan untuk memastikan ibu dan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) memberikan dukungan berupa makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita guna mencegah kekurangan gizi yang bisa berujung pada stunting. Program ini juga bertujuan untuk mendorong pola makan sehat di kalangan ibu hamil dan ibu menyusui. Di samping itu, program Kesehatan Ibu dan Anak mengarah pada penguatan layanan kesehatan yang komprehensif, yang mencakup pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil, kelahiran yang aman, serta pemantauan perkembangan anak di usia dini. Semua program ini diharapkan dapat memberikan solusi preventif terhadap masalah stunting yang terjadi di masyarakat.

Namun, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut sudah diterapkan, stunting tetap menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di daerah-daerah tertentu. Dampak jangka pendek dari stunting meliputi gangguan perkembangan fisik dan mental pada anak, seperti keterlambatan dalam tumbuh kembang, penurunan kecerdasan, serta gangguan metabolisme yang bisa berlanjut ke masalah kesehatan lainnya di masa depan. Sementara itu, dampak jangka panjang dari stunting mencakup penurunan kemampuan

kognitif, penurunan daya tahan tubuh yang mengakibatkan rentannya tubuh terhadap penyakit, hingga peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes, penyakit jantung, kanker, dan stroke di masa depan. Anak-anak yang mengalami stunting juga akan menghadapi kesulitan dalam bersaing di dunia kerja, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas hidup mereka (Unicef Indonesia, 2012).

Provinsi Jawa Barat, yang memiliki populasi terbesar di Indonesia, juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam penurunan angka stunting. Peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat di provinsi ini memerlukan perhatian khusus, terutama di daerah-daerah yang tingkat prevalensi stuntingnya masih cukup tinggi. Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah provinsi telah melakukan implementasi kebijakan-kebijakan nasional dan juga memperkenalkan inisiatif lokal yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Di Kabupaten Bandung, yang juga merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, masalah stunting menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Kesehatan, bersama Puskesmas, Posyandu, dan berbagai organisasi masyarakat, terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka stunting di wilayahnya. Provinsi ini, dengan populasi yang besar, memiliki berbagai daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam, yang memerlukan pendekatan yang berbeda dalam implementasi kebijakan stunting.

Kabupaten Bandung, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, juga menghadapi permasalahan stunting yang cukup tinggi. Untuk menanggulangi masalah tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan berbagai kebijakan, termasuk **Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting**. Perbup ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten, termasuk Puskesmas Kecamatan Cikancung, yang berperan penting dalam implementasi program-program penurunan stunting.

Puskesmas Kecamatan Cikancung berperan sebagai unit pelaksana kebijakan yang sangat vital dalam penanganan masalah stunting. Puskesmas ini bertanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai program yang telah disusun pemerintah Kabupaten Bandung, yang mencakup intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Puskesmas juga menjadi pusat edukasi gizi bagi masyarakat melalui berbagai penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader posyandu. Dengan demikian, Puskesmas Kecamatan Cikancung tidak hanya menjalankan tugas medis, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya gizi yang seimbang sejak usia dini.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III menyebutkan bahwa ada empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan penurunan stunting, komunikasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, dan desa menjadi hal yang sangat penting. Namun, penelitian yang ada menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi antar pihak yang terlibat, terutama dalam hal pemahaman kepala desa dan kader mengenai kebijakan stunting serta peran mereka dalam program tersebut.

Selain itu, keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik dalam hal anggaran, fasilitas, maupun tenaga kerja. Di Puskesmas Kecamatan Cikancung, tenaga kesehatan dan kader posyandu memainkan peranan penting, namun keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di desa serta minimnya fasilitas kesehatan yang memadai menjadi tantangan dalam menerapkan kebijakan dengan optimal. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, yaitu camat, kepala desa, serta petugas kesehatan, juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Jika para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman yang baik dan komitmen yang tinggi terhadap program penurunan stunting, kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Namun, dalam praktiknya, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari beberapa kepala desa dan kader posyandu tentang pentingnya stunting menjadi kendala yang harus diatasi.

Struktur birokrasi yang jelas dan efisien juga diperlukan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Pembentukan tim koordinasi penurunan stunting yang melibatkan berbagai pihak dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan pemerintah desa di tingkat kecamatan sangat

penting untuk memperkuat koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program dan kurang optimalnya pemantauan serta evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Cikancung mengungkapkan kompleksitas masalah gizi yang dihadapi masyarakat di wilayah tersebut. Data yang dikumpulkan tahun 2025 menunjukkan fluktuasi signifikan dalam angka stunting, wasting, dan underweight. Berdasarkan data terkini, angka stunting di Desa Cikancung mencapai 62 kasus, sementara di Desa Mandalasari tercatat 91, di Desa Hegarmanah 119, di Desa Cikasungka 119, dan di Desa Tanjunglaya 92. Total kasus stunting di kelima desa ini mencapai 483 pada tahun 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengHasil Observasi implementasi kebijakan pencegahan dan Penanggulangan stunting di Puskesmas Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang ada dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami implementasi kebijakan publik di tingkat kecamatan serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program penurunan stunting. Dengan ini, peneliti tertarik mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di**

Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung (Studi Puskesmas Cikancung)”.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengHasil Observasi implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Kecamatan Cikancung, mengingat tingginya prevalensi stunting yang mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu bagaimana kebijakan pencegahan stunting diterapkan di tingkat kecamatan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut, serta peran pemerintah kecamatan dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Selain itu, penelitian ini juga akan menambah fokus pada sasaran dari kebijakan tersebut, termasuk upaya edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya asupan gizi yang baik selama kehamilan dan pelaksanaan pemeriksaan gizi pada balita. Edukasi kepada ibu hamil merupakan aspek penting dalam pencegahan stunting karena kekurangan gizi selama kehamilan dapat berpengaruh pada perkembangan janin dan bayi setelah lahir. Pemeriksaan gizi pada balita juga sangat diperlukan untuk memantau status gizi anak sejak dini, guna mencegah terjadinya stunting di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini diterapkan dan bagaimana program edukasi serta pemeriksaan gizi dapat membantu menurunkan angka stunting di Kecamatan Cikancung.

1.3 Rumusan Masalah

Dari uraian konteks penelitian yang peneliti paparkan diatas, maka peneliti menarik rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Impelentasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Cikancung (Studi Puskesmas Cikancung)?
2. Faktor Apa Saja yang Menghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulang Stunting di Kecamatan Cikancung (Studi Puskesmas Cikancung)?
3. Bagaimana Usaha yang dilakukan oleh Kecamatan Cikancung (Studi Puskesmas Cikancung) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penurunan stunting di Puskesmas Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Cikancung (Studi Puskesmas Cikancung)

3. Untuk Mengetahui Usaha apa saja yang dilakukan Kecamatan Cikancung (Studi Puskesmas Cikancung) dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

1.5 Kegunaan Penelitian

Penentuan nilai suatu penelitian ditentukan oleh sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat yang diantisipasi dari penelitian meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dengan cara merealisasikan ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan yaitu pada mata kuliah implementasi kebijakan publik agar dapat mengHasil Observasi implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Kecamatan Cikancung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi untuk masyarakat dan segala pihak yang terlibat dalam rangka untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Kecamatan Cikancung